



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, perencanaan strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis lokal, nasional, global dan tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan pendekatan perencanaan strategis yang jelas dan sinergis, instansi pemerintah lebih dapat menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi, peluang, dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kinerjanya.

Sebagai sebuah instansi sektor publik, Pemerintah Kota Lhokseumawe mempunyai rencana strategis yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun, yaitu untuk Tahun 2012-2017 dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau mungkin timbul untuk memetakan posisi Pemerintah Lhokseumawe.

Perencanaan Strategis Kota Lhokseumawe dituangkan ke dalam RPJM Kota Lhokseumawe Tahun 2012-2017, berorientasi kepada hasil yang ingin dicapai dalam kerangka waktu jangka menengah selama lima tahun. RPJM disusun dengan memperhitungkan analisis lingkungan baik kekuatan daerah, kelemahan, peluang, dan kendala yang ada maupun yang diprediksikan akan muncul. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Lhokseumawe Tahun 2012-2017 telah ditetapkan dengan *Qanun RPJMD Kota Lhokseumawe Nomor 5 Tahun 2014*. Penjabaran lebih lanjut dalam perencanaan tahunan di tuangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2017 dan Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Kota Lhokseumawe Tahun 2017.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Lhokseumawe Tahun 2012-2017 merupakan Dokumen perencanaan strategis

yang disusun dan dirumuskan setiap 5 (lima) tahun yang merupakan perencanaan jangka menengah yang menggambarkan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Program dan kegiatan daerah. Dan secara sistematis mengedepankan isu – isu lokal yang diterjemahkan kedalam bentuk strategis kebijakan dan rencana pembangunan yang terarah, efektif dan berkesinambungan sehingga dapat diimplementasikan secara bertahap sesuai dengan skala prioritas dan kemampuan anggaran pembiayaan.

Dalam kaitan dengan sistem perencanaan pembangunan nasional sebagaimana telah diamanatkan dalam UU No.25 tahun 2004, keberadaan RPJM Daerah Kota Lhokseumawe merupakan satu bagian yang utuh dari manajemen kerja di lingkungan Pemerintah Kota Lhokseumawe khususnya dalam menjalankan agenda pembangunan yang seharusnya tertuang dalam *RPJP Daerah Kota Lhokseumawe Nomor 4 Tahun 2014* maupun RT/RW Kota Lhokseumawe. Dari keberadaannya akan dijadikan pedoman penyusunan Renstra SKPD.

Berdasarkan RPJMD Pemerintah Kota Lhokseumawe Tahun 2012-2017, ditetapkanlah Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Lhokseumawe sesuai dengan Keputusan Walikota Lhokseumawe Nomor 122 Tahun 2017 tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kota Lhokseumawe Tahun 2017 Kemudian Penjabaran program dan kegiatan dituangkan ke dokumen Rencana Kinerja Tahun 2017, serta Penetapan Kinerja Tahun 2017.

Sesuai dengan sistematika terbaru penyusunan LKj IP Tahun 2017 berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka rencana strategis Kota Lhoskeumawe Tahun 2012-2017 di jabarkan kedalam dokumen Rencana Kinerja Tahun 2017 Pemerintah Kota Lhokseumawe, yang selanjutnya akan ditetapkan dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2017 yang sesuai dengan dokumen pelaksana anggaran Tahun 2017.

2.1 PERENCANAAN STRATEGIK PEMERINTAH KOTA LHOKSEUMAWE

Qanun RPJMD Kota Lhokseumawe Nomor 5 Tahun 2014 disusun dengan mengakomodir berbagai tuntutan *stakeholders* antara lain pengawasan yang profesional, pelayanan prima, perwujudan pemerintahan yang bersih, berwibawa dan bebas KKN, serta penerapan *good governance* dalam seluruh aspek asas-asas penyelenggaraan pemerintahan.

Perencanaan Strategik yaitu perencanaan pembangunan daerah yang menekankan pada pencapaian visi dan misi pembangunan daerah, dalam pencapaian perencanaan strategik tersebut dapat dijabarkan dalam 7 (tujuh) prioritas pembangunan Kota Lhokseumawe priode tahun 2012-2017 diantaranya:

1. Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan
2. Pendidikan
3. Kesehatan
4. Agama, Sosial dan Budaya
5. Ekonomi
6. Infrastruktur
7. Lingkungan Hidup

Perencanaan Strategis Pemerintah Kota Lhokseumawe yang dituangkan dalam RPJMD Kota Lhokseumawe Tahun 2012-2017 selanjutnya dapat dilihat secara rinci pada Lampiran Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Lhokseumawe Tahun 2017.

VISI

Sejalan dengan perkembangan era globalisasi, Kota Lhokseumawe menghadapi sejumlah permasalahan, tantangan dan atau ancaman yang sangat komplek dengan berbagai dimensinya seperti : kesehatan, pendidikan, penegakan Syariat Islam, penciptaan lapangan kerja, pelestarian dan penyelamatan lingkungan dan lain sebagainya. Oleh karenanya untuk membangun Lhokseumawe yang lebih baik dimasa mendatang pada RPJMD Tahun 2012-2017 memberi prioritas pada

upaya untuk mengatasi permasalahan tersebut diatas, termasuk mengantisipasi perubahan yang terjadi di masa yang akan datang.

Dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan peluang yang ada, serta mempertimbangkan budaya masyarakat aceh yang syar'i, khususnya masyarakat Lhokseumawe, dan untuk menjaga amanah dari ALLAH SWT serta Amanah masyarakat Aceh umumnya, maka visi yang hendak dicapai dalam periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Lhokseumawe adalah :



**“ KOTA LHOKSEUMAWE YANG BERMARTABAT,
SEJAHTERA, BERKEADILAN DAN MANDIRI
BERLANDASKAN UNDANG-UNDANG PEMERINTAHAN
ACEH (UUPA) SEBAGAI WUJUD
MoU HELSINKI”**

Makna yang terkandung dalam Visi tersebut adalah :

Bermartabat: dapat diwujudkan dengan berpedoman melalui peraturan-peraturan hasil turunan UUPA dan peraturan perundangan lainnya, pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, bebas dari praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, serta menegakkan supremasi hukum dan HAM, mengangkat kembali budaya Aceh, khususnya Kota Lhokseumawe yang islami dan pelaksanaan nilai-nilai Dinul Islam dalam tatanan kehidupan bermasyarakat.

Sejahtera: adalah terwujudnya kesejahteraan masyarakat Kota Lhokseumawe melalui pembangunan ekonomi berazaskan pada potensi unggulan lokal dan budaya asing, pengoptimalisasi pemanfaatan sumber daya alam dan geopolitik, peningkatan indeks pembangunan manusia dan mengembangkan kemampuan menguasai ilmu pengetahuan teknologi.

Berkeadilan: adalah terwujudnya pembangunan yang adil dan merata yang dilakukan secara partisipatif, proporsional dan berkelanjutan berdasarkan prinsip kebutuhan dan azas manfaat bagi masyarakat Kota Lhokseumawe.

Mandiri: adalah Kota Lhokseumawe mampu memanfaatkan potensi sumber daya alam yang melimpah dan keunggulan geostrategis melalui penguatan kapasitas sumber daya manusia, efesiensi dan efektifitas anggaran,

serta penguasaan teknologi informasi, sehingga bermanfaat sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat Kota Lhokseumawe.

Berdasarkan UUPA sebagai wujud MoU Helsinki: adalah mewujudkan pelaksanaan Pemerintahan Kota Lhokseumawe yang efektif dan efisien sebagaimana yang telah dituangkan dalam Undang-Undang tersebut guna tercapainya masyarakat Kota Lhokseumawe yang mandiri, makmur dan sejahtera.

MISI

Untuk mewujudkan visi pembangunan Kota Lhokseumawe yang akan dicapai tahun 2012-2017, Pemerintah Kota Lhokseumawe menetapkan 5 (lima) misi yaitu:

1. Menjalankan tata kelola Pemerintah Kota Lhokseumawe yang amanah dengan mengimplementasikan Undang-Undang Pemerintah Aceh (UUPA);
2. Menerapkan nilai-nilai budaya Aceh dan nilai-nilai Dinul Islam disemua sektor kehidupan masyarakat;
3. Memperkuat stuktur sosial ekonomi, peningkatan nilai tambah produksi masyarakat serta optimalisasi pemanfaatan SDA;
4. Meningkatkan Kualitas SDM melalui pendidikan dan kesehatan;
5. Melaksanakan pembangunan infrastruktur Kota Lhokseumawe yang proporsional terintegrasi dan berkelanjutan.

TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan merupakan penjabaran misi dan merupakan sesuatu yang akan dicapai dalam waktu satu hingga lima tahun. Tujuan dan sasaran strategis yang ditetapkan Pemerintah Kota Lhokseumawe adalah sebagai berikut:

Tujuan 1		Mewujudkan Tata Kelola dan Kualitas Pemerintahan Daerah yang Baik	
Sasaran		Program	
	Meningkatnya Kesadaran, Kepatuhan dan Ketaatan Masyarakat terhadap Hukum sebagai Wujud	1.1.1	Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan
		1.1.2	Program Penataan Daerah Otonomi Baru

	Implementasi UUPA;		
		1.1.3	Otonomi khusus
		1.1.4	Pemberdayaan Masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan
		1.1.5	Pendidikan politik masyarakat
		1.1.6	Kemitraan pembangunan wawasan kebangsaan
		1.1.7	Peningkatan pemberantasan pekat
		1.1.8	Dukungan kelancaran penyelenggaraan Pemilu
		1.1.9	Peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan
		1.1.10	Pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak criminal
		1.1.11	Program pengembangan wawasan kebangsaan
		1.1.12	Program dukungan kelancaran pengawasan pemilu
1.2	Mengoptimalkan Pelayanan Publik dengan mengedapankan kualitas Kerja dan Profesionalisme Aparatur sebagai upaya peningkatan Kinerja;	1.2.1	Program Pembinaan dan pengembangan aparatur
		1.2.2	Program Peningkatan disiplin aparatur
		1.2.3	Program Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
		1.2.4	Program Peningkatan sistem pelayanan terpadu satu pintu
		1.2.5	Program Penataan administrasi kependudukan
		1.2.6	Program Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi
		1.2.7	Pengembangan komunikasi, informasi dan media masa
		1.2.8	Kerjasama Informasi dengan Mass Media
		1.2.9	Penyusunan perencanaan satuan kerja perangkat daerah

		1.2.10	Pengembangan data/informasi
		1.2.11	Perencanaan pembangunan daerah

Tujuan 2		Mewujudkan Nilai-nilai Budaya Aceh dan Nilai-nilai Dinul Islam di Semua Sektor Kehidupan Masyarakat	
Sasaran		Program	
2.1	Meningkatkan pemahaman dan penghayatan masyarakat terhadap sejarah Aceh sebagai nilai budaya dalam tatanan kehidupan	2.1.2	Pengembangan nilai budaya
		2.1.3	Pengelolaan kekayaan budaya
		2.1.4	Pengelolaan keragaman budaya
		2.2.1	Pengembangan kerja sama pengelolaan kekayaan budaya
2.2	Mewujudkan masyarakat Kota Lhokseumawe yang berkualitas dan memiliki karakter islam;	2.2.2	Penguatan Lembaga Adat
		2.2.3	Pembinaan keagamaan dan adat
		2.2.4	Pembinaan kepemudaan
		2.2.5	Peningkatan pelayanan kehidupan beragama (khusus syariat islam)
		2.2.6	Peningkatan bidang keistimewaan Aceh dan Kesra

Tujuan 3		Memperkuat Stuktur Ekonomi, Ketahanan Pangan dan Penanggulangan Kemiskinan	
Sasaran		Program	
3.1	Mewujudkan Kamandirian Keuangan Daerah dan Kesejahteraan Masyarakat;	3.1.2	Perencanaan pembangunan wilayah strategi dan cepat tumbuh
		3.1.3	Perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam
		3.1.4	Pengembangan data/informasi/statistik daerah
		3.1.5	Kerjasama pembangunan
		3.1.6	Peningkatan Efektifitas Pengeluaran Daerah

		3.1.7	Peningkatan dan pengembangan pengelola keuangan daerah
		3.1.8	Pembinaan dan efektifitas pengelolaan kekayaan daerah
		3.1.9	Pembinaan dan fasilitas pengelolaan kekayaan daerah
		3.1.10	Pembinaan dan fasilitas pengelolaan keuangan desa
		3.1.11	Peningkatan keberdayaan Masyarakat Perdesaan
		3.1.12	Peningkatan Penerimaan dan pengamanan keuangan daerah
		3.1.13	Peningkatan kesejahteraan petani
		3.1.14	Pengembangan dagang dan industri kecil dan menengah
		3.1.15	Pengembangan Industri kecil
		3.1.16	Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri
		3.1.17	Pengembangan Sentra-sentra Industri Pontesial
		3.1.18	Pengembangan Sentra-sentra Industri Pontesial
		3.1.19	Pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompotitip Usaha Kecil Menengah
		3.1.20	Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi Mikro Kecil Menengah
		3.1.21	Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi
		3.1.22	Pengembangan dan Pembinaan Koperasi dan UKM
3.2	Menurunnya Angka Kemiskinan;	3.2.1	Pelayanan dan Rehabilitas Kesejahteraan Sosial
		3.2.2	Pembinaan Anak Terlantar
		3.2.3	Pembinaan para penyandang Cacat dan Trauma
		3.2.4	Pembinaan Panti Asuhan/Panti Jompo

		3.2.5	Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks Narapidana, PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial Lainnya)
		3.2.6	Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
		3.2.7	Peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja
		3.2.8	Peningkatan kesempatan bekerja
		3.2.9	Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia
		3.2.10	Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Asat Terpencil (KAT) dan penyandang masalah kesejahteraan
3.3	Peningkatan Produktivitas Hasil Pertanian, Perikanan dan Peternakan yang berbasis Komoditi Unggulan;	3.3.1	Peningkatan budaya kelautan dan wawasan maritim kepada masyarakat
		3.3.2	Peningkatan Produksi, Pertanian/Perkebunan
		3.3.3	Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak
		3.3.4	Peningkatan pemasaran hasil produk peternakan
		3.3.5	Pengembangan budidaya perikanan
		3.3.6	Pengembangan perikanan tangkap
		3.3.7	Peningkatan Kesejahteraan nelayan
		3.3.8	Optimalisasi pengelola dan pemasaran Produksi
		3.3.9	Peningkatan Produksi hasil peternakan
		3.3.10	Peningkatan budaya kelautan dan wawasan maritim kepada masyarakat
3.4	Meningkatkan Perlindungan terhadap Perempuan dan Anak	3.4.1	Penguatan kebijakna peningkatan kualitas Anak dan Perempuan
		3.4.2	Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak
		3.4.3	Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan
		3.4.4	Peningkatan peran serta dan kesetaraan Gender dalam pembangunan

Tujuan 4		Mewujudkan Wisata yang Berkonsep Islami di semua Sektor Parawisata	
Sasaran		Program	
4.1	Meningkatkan PAD Daerah melalui Sektor Parawisata;	4.1.1	Peningkatan promosi dan kerja sama investasi
		4.1.2	Peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi
		4.1.3	Penyiapan potensi sumberdaya, sarana dan prasarana daerah
		4.1.4	Peningkatan dan pengembangan ekonomi pembangunan
		4.1.5	Pengembangan Pemasaran Parawisata
		4.1.6	Pengembangan Destinasi

Tujuan 5		Meningkatkan Kualitas Pendidikan dan Sumber Daya Manusia Yang Sesuai Dengan Nilai-Nilai Azas Keislaman	
Sasaran		Program	
5.1	Mewujudkan Pendidikan yang Berkualitas;	5.1.1	Pendidikan Anak Usia Dini
		5.1.2	Pendidikan Menengah
		5.1.3	Pendidikan Non Formal
		5.1.4	Pendidikan luar biasa
		5.1.5	Perencanaan, Pengawasan dan peningkatan mutu MPD
		5.1.6	Wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun
		5.1.7	Pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan
		5.1.8	Manajemen pelayanan pendidikan
		5.1.9	Pengembangan dan keserasian kebijakan pemuda
5.2	Menciptakan SDM pada Bidang Pemuda dan Olahrag;	5.1.10	Peningkatan peran serta kepemudaan
		5.1.11	Peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecapan hidup pemuda
		5.1.12	Upaya penyalahgunaan narkoba

		5.1.13	Pengembangan kebijakan dan manajemen olahraga
		5.1.14	Pembinaan dan pemasyarakatan Olahraga

Tujuan 6		Meningkatkan Kualitas Kesehatan Masyarakat Kota Lhokseumawe	
Sasaran		Program	
6.1	Mewujudkan layanan Kesehatan yang Berkualitas dan Optimal	6.1.1	Pengawasan obat dan makanan
		6.1.2	Standarisasi pelayanan kesehatan
		6.1.3	Pelayanan kesehatan penduduk miskin
		6.1.4	Kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan
		6.1.5	Pengawasan dan pengendalian
		6.1.6	Obat dan perbekalan kesehatan
		6.1.7	Pengadaan peningkatan dan perbaikan sarana dan prasana Puskesmas/Putu dan Jaringan
		6.1.8	Pengadaan peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit jiwa/Rumah Sakit Paru/Rumah Sakit Mata
		6.1.9	Pemeliharaan sarana dan prasaran Rumah Sakit/Rumah Sakit jiwa/Rumah Sakit Paru/Rumah Sakit Mata
		6.1.10	Promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat
		6.1.11	Perbaikan Gizi Masyarakat
		6.1.12	Upaya Kesehatan Masyarakat
		6.1.13	Pengembangan Lingkungan Sehat
		6.1.14	Pencegahan dan penanggulangan penyakit menular
		6.1.15	Peningkatan pelayanan kesehatan balita
		6.1.16	Peningkatan pelayanan kesehatan lansia
		6.1.17	Peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak

Tujuan 7		Mewujudkan integrasi Infrastruktur dan Energi untuk Mengikatkan Pembangunan yang Berkelanjutan	
Sasaran		Program	
7.1	Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Kota	7.1.1	Pembangunan jalan dan jembatan
		7.1.2	Pembangunan saluran drainase/ Gorong-gorong
		7.1.3	Pembangunan turap/talud/bronjong
		7.1.4	Pembangunan sarana dan prasarana umum
		7.1.5	Peningkatan fasilitas sarana dan prasarana umum
		7.1.6	Peningkatan sarana dan prasarana olahraga
		7.1.7	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
		7.1.8	Pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan
		7.1.9	Penerapan pembangunan berbasis Tata Ruang dan Zoning Regulation
		7.1.10	Pengembangan kinerja pengelolaan persampahan
		7.1.11	Peningkatan keindahan dan keserasian kota
		7.1.12	Normalisasi jaringan air limbah
		7.1.13	Lingkungan sehat perumahan
		7.1.14	Rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan
		7.1.15	Pengembangan Kinerja pengelolaan air minum dan air limbah
		7.1.16	Pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh
		7.1.17	Pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya
		7.1.18	Pembangunan sarana dan prasarana perhubungan
		7.1.19	Pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan

	7.1.20	Rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas LLAJ
	7.1.21	Pengembangan sarana penunjang transportasi
	7.1.22	Pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam
	7.1.23	Pengendalian kebakaran hutan
	7.1.24	Perencanaan tata ruang
	7.1.25	Pengawasan dan penertiban kegiatan kerakyatan yang berpotensi merusak lingkungan
	7.1.26	Pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup
	7.1.27	Perlindungan dan konservasi sumber daya alam
	7.1.28	Rehabilitasi dan pemulihan cadangan sumber daya alam
	7.1.29	Peningkatan pelayanan angkutan
	7.1.30	Pengendalian dan pengamanan lalu lintas
	7.1.31	Peningkatan kualitas dan akses informasi sumberdaya alam
	7.1.32	Peningkatan kualitas SDM pengelola lingkungan hidup

2.2 RENCANA KINERJA TAHUN 2017

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Pemerintah Kota Lhokseumawe Tahun 2017 merupakan penjabaran dari target dari setiap sasaran dan indikator yang telah ditetapkan dalam Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Lhokseumawe.

Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian sasaran yang telah ditetapkan. Penetapan indikator kinerja harus didasarkan pada perkiraan yang realistis dengan memperhatikan tujuan dan sasaran yang ditetapkan serta data pendukung yang harus diorganisir.

Untuk mewujudkan sasaran-sasaran strategis tersebut di atas, Pemerintah Kota Lhokseumawe telah menetapkan 175 program dan 59 Indikator Kinerja Utama sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam Keputusan Walikota Nomor 112 Tahun 2017. Uraian lebih rinci mengenai indikator kinerja utama dan target dari setiap sasaran yang ada dapat dilihat pada lampiran II Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Lhokseumawe, sementara untuk rencana kinerja tahun 2017 seperti yang terlihat pada tabel 2.1 berikut:

Tabel 2.1
Rencana Kinerja Tahun 2017

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN HASIL	TARGET
1	2	3	4	5
1.	Meningkatkan Kesadaran, Kepatuhan dan Ketaatan masyarakat terhadap hukum sebagai wujud implementasi UUPA;	• Publikasi Perturan Perundang-Undangan	Media	4
		• Penegakan dan Penertiban Pelanggaran Peraturan Daerah	Kasus	200
		• Rasio jumlah Polisi Pamong Praja Per 10.000 Penduduk	%	5.03%
		• Penguatan Lembaga Peradilan Adat Gampong	%	100%
2.	Mengoptimalkan Pelayanan Publik dengan Mengedepankan Kualitas Kerja dan Profesionalisme Aparatur sebagai Peningkatan Kinerja;	• Persentase PNS yang menduduki Jabatan Struktural yang sudah mengikuti Diklat Kepemimpinan	%	100%
		• Persentase PNS yang mendapat hukuman disiplin dan Pemberhentian	%	0.83%
		• Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Daerah	OPINI	WTP
		• Kepemilikan KTP	%	100%
		• Lamanya Proses Perijinan	Hari	1 s/d 7 Hari
		• Evaluasi Penyelenggaraan SAKIP SKPD	%	100%

		<ul style="list-style-type: none"> • Nilai Hasil Evaluasi Laporan Kinerja dan Penyelenggaraan Pemerintahan Kota - LPPD - LKj IP 	<p>Angka Absolut</p> <p>Kategori</p>	<p>Sangat Tinggi (3)</p> <p>B (60)</p>
		• Keterbukaan Informasi Publik melalui Website	Ada/tidak ada	ada
		• Tingkat Keselarasan Dokumen RKPD dengan Dokumen RPJMD	%	100%
		• Persentase Penanganan Bencana	%	100%
		• Indeks minat baca masyarakat	%	100%
3.	Meningkatkan Pemahaman dan Penghayatan Masyarakat terhadap Sejarah Aceh Sebagai Nilai Budaya dalam Tataan Kehidupan;	<ul style="list-style-type: none"> • Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya 	Kali	1
		• Pelestarian Karya Seni dan Budaya Warisan sebagai Nilai Sejarah	Jenis	5
		• Pembinaan Kelompok Seni dan Budaya yang aktif	Klp	1
4.	Mewujudkan Masyarakat Kota Lhokseumawe yang berkualitas dan memiliki karakter Islami;	• Rasio ketersediaan Dayah dan Santri	%	0.007
		• Rasio ketersediaan Tengku/Guru dan Santri	%	0.07
		• Rasio kesejahteraan Balai Pengajian di Gampong	%	0025%
		• Peningkatan Syiar Islam melalui pelatihan keagamaan	%	100%
		• Peningkatan penerimaan zakat	%	100%
5.	Mewujudkan Kemandirian Keuangan Daerah dan Kesejahteraan Masyarakat;	<ul style="list-style-type: none"> • Pertumbuhan PDRB - Migas - Non Migas 	<p>%</p> <p>%</p>	<p>2.46</p> <p>7.12</p>

		• Persentase Koperasi Aktif	%	88%
		• Jumlah Usaha Mikro dan Kecil	Unit	1.895
		• Rata-rat jumlah kelompok binaan PKK	%	14.71%
6.	Menurunnya Angka Kemiskinan;	• Indeks Pembangunan Manusia Kota Lhokseumawe	Angka/Absolut	78
		• Kelancaran Peyaluran Raskin	RTS	7.200
		• Tingkat Pengangguran Terbuka	%	6,55%
		• Rasio Penduduk yang bekerja (Persentase Penduduk yang Bekerja terhadap Angkatan)	%	92.06
		• Angka Partisipasi Angkatan Kerja	%	89.81
		• Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang terlayani	%	100%
7.	Meningkatkan Produktivitas Hasil Pertanian, Perikanan dan Peternakan yang berbasis Komoditi Unggulan;	• Peningkatan Prpduksi Padi	Ton	587.78
		• Produksi Daging per Tahun - Sapi - Kambing	Ekor Ekor	21.607.630 2.282.456
		• Produksi Perikanan per Tahun - Teri - Tuna	Kg Kg	150.000 25.000
8.	Meningkatkan PAD Daerah melalui Sektor Parawisata	• Jumlah Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah Tahun 2017	Rupiah	32,875,450,951
		• Kunjungan Wisata	Jiwa	229.095

9.	Mewujudkan Pendidikan yang Berkualitas;	• Angka Harapan Lama Sekolah	Tahun	15
		• Angka Partisipasi Murni		
		- SD/MI/Paket A	%	93.99%
		- SMP/MTS/Paket B	%	80.11%
		- SMK/MA/Paket C	%	77.55%
		• Angka Kelulusan		
		- Angka Kelulusan (AL) SD/MI	%	99.87%
		- Angka Kelulusan (AL) SMA/SMK/MA	%	99.13%
10.	Menciptakan SDM pada Bidang Pemuda dan Olahraga;	• Pembinaan terhadap Organisasi Pemuda	Klp	68
		• Pembinaan terhadap Organisasi Olahraga	Klp	159
11.	Mewujudkan Layanan Kesehatan yang Berkualitas dan Optimal;	• Rasio Puskesmas per satuan penduduk	/1000 Pddk	0.04
		• Rasio Dokter per satuan penduduk	/1000 Pddk	0.19
		• Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan	%	100%
		• Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TB baru	%	100%
		• Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD	%	100%
		• Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	%	100%
		• Angka Kelangsungan Hidup Bayi	%	100%
		• Angka Usia Harapan Hidup	/1.000	1.000
12.	Meningkatkan Perlindungan terhadap Perempuan dan Anak;	• Cakupan peserta KB aktif	%	91.67%
		• Rasio KDRT	%	0.019%
		• Pembinaan Forum Komunikasi Anak	Org	781

		• Indeks Kesetaraan dan Keadilan Gender	%	98%
		• Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi	%	97.09%
		• Pembinaan gampong (desa) layak anak	Gampong	10
		• Rasio Bayi berakte lahir	%	100%
13.	Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Kota.	• Penurunan persentase kawasan permukiman kumuh	%	92.12%
		• Proporsi panjang jaringan dalam kondisi baik	%	78.8%
		• Luar irigasi Kota dalam kondisi baik	%	80
		• Drainase dalam kondisi baik	%	85.12%
		• Persentase penanganan sampah	%	96.54%
		• Rasio tempat pembuangan sampah per satuan penduduk	%	1.36%
		• Bangunan yang ber – IMB	%	0.032%
		• Rasio ruang terbuka Hijau persatuan luas wilayah ber HPL/HGB	%	1,36%

2.3 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

Sesuai dengan dokumen Penetapan Kinerja Pemerintah Kota Lhokseumawe Tahun 2017, Walikota Lhokseumawe telah menetapkan 135 *program* yang dijanjikan akan dilaksanakan pada tahun 2017, sebagai berikut:

- 1 Pelayanan Administrasi Perkantoran
- 2 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
- 3 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

- 4 Penyusunan Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Kerja
- 5 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
- 6 Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
- 7 Peningkatan Disiplin Aparatur
- 8 Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender Anak
- 9 Peningkatan Peran serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan
- 10 Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga
- 11 Kesehatan Reproduksi Remaja
- 12 Keluarga Berencana
- 13 Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan
- 14 Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa
- 15 Peningkatan Peran Perempuan di Perdesaan
- 16 Peningkatan Efektivitas Pengeluaran Daerah
- 17 Peningkatan Penerimaan dan Pengamanan Keuangan Daerah
- 18 Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
- 19 Peningkatan Pelayanan Kedinasan KDH dan WKDH
- 20 Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi
- 21 Pengelolaan Data dan Informasi
- 22 Kerjasama Informasi dengan Mass Media
- 23 Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
- 24 Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah
- 25 Penataan Perundang-undangan
- 26 Penataan daerah Otonomi Daerah
- 27 Peningkatan dan Pengembangan Ekonomi dan Pembangunan
- 28 Peningkatan Bidang Keistimewaan Aceh dan Kesra
- 29 Peningkatan Fasilitas Sarana dan Prasarana Umum
- 30 Peringatan Hari-hari Besar

- 31 Peningkakatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
- 32 Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Kekayaan Daerah
- 33 Pembinaan Akuntansi Keuangan Daerah
- 34 Pembinaan dan Fasilitas Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota
- 35 Peningkatan Pelayanan Kehidupan Beragama (Khusus Syari'at Islam)
- 36 Peningkatan Pelaksanaan Syari'at Islam dan Peran Ulama
- 37 Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksana Kebijakan KDH
- 38 Pendidikan, Pembinaan dan Pengembangan Dayah
- 39 Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja
- 40 Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi
- 41 Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan
- 42 Peningkatan Sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu
- 43 Obat dan Pembekalan Kesehatan
- 44 Upaya Kesehatan Masyarakat
- 45 Pengawasan Obat dan Makanan
- 46 Perbaikan Gizi Masyarakat
- 47 Pengembangan Lingkungan Sehat
- 48 Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
- 49 Standarisasi Pelayanan Kesehatan
- 50 Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya
- 51 Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata
- 52 Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan
- 53 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita
- 54 Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak
- 55 Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan

- 56 Penataan Administrasi Kependudukan
- 57 Pembangunan Jalan dan Jembatan
- 58 Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong
- 59 Lingkungan Sehat Perumahan
- 60 Pembangunan Turap/Talid/Brojong
- 61 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
- 62 Pembangunan Sarana dan Prasarana Umum
- 63 Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah
- 64 Pengendalian Banjir
- 65 Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh
- 66 Pembangunan Insfrastruktur Pedesaan
- 67 Pendidikan Politik Masyarakat
- 68 Dukungan Kelancaran Penyelenggaraan Pemilu
- 69 Otonomi Khusus
- 70 Peningkatan Kesejahteraan Petani
- 71 Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan
- 72 Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan
- 73 Peningkatan Produksi Hasil Peternakan
- 74 Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/perkebunan
- 75 Peningkatan Kegiatan Budaya Kelautan dan Wawasan Maritim kepada Masyarakat
- 76 Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan
- 77 Pengembangan Budidaya Perikanan
- 78 Peningkatan Ketahanan Pangan
- 79 Pengembangan Perikanan Tangkap
- 80 Optimalisasi Pengelolaan Pemasaran Produksi Perikanan
- 81 Peningkatan Sumber Daya Perikanan
- 82 Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah

- 83 Pendidikan Anak Usia Dini
- 84 Pengelolaan Kekayaan Budaya
- 85 Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
- 86 Pendidikan Menengah
- 87 Pengelolaan Keragaman Budaya
- 88 Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya
- 89 Pengembangan Sarana dan Prasarana Kebudayaan
- 90 Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan
- 91 Manajemen Pelayanan Pendidikan
- 92 Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
- 93 Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal
- 94 Pengembangan Data/Informasi
- 95 Kerjasama Pembangunan
- 96 Perencanaan Pengembangan Kota -kota Menengah Besar
- 97 Perencanaan Pembangunan Daerah
- 98 Perencanaan Sosial dan Budaya
- 99 Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam
- 100 Koordinasi Perencanaan Pembangunan
- 101 Program Khusus
- 102 Pembangunan Data/Informasi/Statistik Daerah
- 103 Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan
- 104 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ
- 105 Peningkatan Pelayanan Angkutan
- 106 Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan
- 107 Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas
- 108 Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
- 109 Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
- 110 Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam

- 111 Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau
- 112 Peningkatan Fasilitas Sarana dan Prasarana Umum
- 113 Peningkatan Keindahan dan Keserasian Kota
- 114 Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam
- 115 Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan
- 116 Pengembangan Pemasaran Parawisata
- 117 Pengembangan Destinasi Parawisata
- 118 Pengembangan Kemitraan
- 119 Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga
- 120 Peningkatan Penyelenggaraan Kegiatan Baitul Mal
- 121 Perencanaan dan Pengawasan/Monitoring dan Evaluasi
- 122 Pembinaan, Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Ulama
- 123 Penelitian dan Pengembangan Agama
- 124 Peningkatan dan pengembangan Pembangunan
- 125 Penciptaan Iklim Usaha Kecil Mengah yang Konduksif
- 126 Pengembangan Industri Kecil dan Menengah
- 127 Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri
- 128 Pengembangan Sentra-sentra Industri Pontesial
- 129 Pengembangan Dagang dan Industri Kecil dan Menengah
- 130 Peningkatan Mutu Industri
- 131 Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang, Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya
- 132 Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
- 133 Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma
- 134 Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan
- 135 Pembinaan Aparatur dan Pemerintahan Desa/Kelurahan/Kecamatan
- 136 Peningkatan Penyelenggaraan Kegiatan dan Pembinaan Masyarakat Pemerintahan Desa/Kelurahan (Khusus Kecamatan)
- 137 Pembinaan Panti Asuhan/Panti Jompo

Untuk pelaksanaan seluruh program dan kegiatan, Dana yang dialokasikan Pemerintah pada APBK-P Tahun 2017 sebesar **Rp. 492.283.190.315 (Belanja Langsung)**.

Dari 137 program kegiatan yang ditetapkan dalam Penetapan Kinerja, terdapat 60 Indikator Kinerja Utama sebagai berikut:

- 1 Publikasi Peraturan Perundang - Undangan
- 2 Penegakan dan penertiban pelanggaran Peraturan Daerah
- 3 Persentase PNS yang menduduki jabatan struktural yang sudah mengikuti Diklat Kepemimpinan
- 4 Persentase PNS yang mendapat hukuman disiplin dan pemberhentian
- 5 Opimi BPK terhadap Laporan Keuangan daerah
- 6 Kepemilikan KTP
- 7 Lamanya Proses Perijinan
- 8 Evaluasi penyelenggaraan SAKIP SKPD
Nilai hasil evaluasi Laporan Kinerja dan Penyelenggaraan Pemerintahan Kota
- 9 - LPPD
- LKj IP
- 10 Keterbukaan informasi publik melalui Website
- 11 Tingkat keselarasan dokumen RKPD dengan dokumen RPJMD
- 12 Persentase penanganan bencana
- 13 Penyelenggaraan festival seni dan budaya
- 14 Pelestarian karya seni dan budaya warisan sebagai nilai sejarah
- 15 Pembinaan kelompok seni dan budaya yang aktif
- 16 Rasio ketersediaan Dayah dan Santri
- 17 Rasio Ketersediaan Tengku/Guru dan Santri
- 18 Rasio ketersediaan balai pengajian di gampong
- 19 Pembinaan Hafidz dan Hafidzah Kota Lhokseumawe
- 20 Peningkatan penerimaan zakat
Pertumbuhan PDRB
- 21 - Migas
- Non Migas
- 22 Persentase koperasi aktif
- 23 Jumlah mikro dan usaha kecil
- 24 Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK
- 25 Indeks Pembangunan Manusia Kota Lhokseumawe
- 26 Kelancaran Penyaluran Raskin
- 27 Tingkat pengangguran terbuka
- 28 Rasio penduduk yang bekerja (persentase penduduk yang bekerja terhadap angkatan)
- 29 Angka partipasi angkatan kerja
- 30 Persentase penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) yang

- terlayani
- 31 Persentase penanggulangan penyakit ternak
 - 32 Pengembangan budidaya perikanan
 - 33 Cakupan binaan Kelompok Nelayan
 - 34 Jumlah penerimaan pajak dan retribusi daerah Tahun 2017
 - 35 Kunjungan wisata
 - 36 Persentase Penduduk usia > 15 Tahun yang melek huruf
- Angka partisipasi murni
- 37
 - SD/MI/Paket A
 - SMP/MTs/Paket B
 - SM/MA/Paket C
- Angka Kelulusan
- 38
 - Angka Kelulusan (AL) SD/MI
 - Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs
 - Angka Kelulusan (AL) SMA/SMK/MA
 - 39 Persentase guru berpendidikan S1/D4
 - 40 Pembinaan terhadap organisasi pemuda
 - 41 Pembinaan terhadap organisasi olahraga
 - 42 Rasio puskesmas per satuan penduduk
 - 43 Cakupan Kunjungan Bayi
 - 44 Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan
 - 45 Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TB baru
 - 46 Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD
 - 47 Angka kelangsungan hidup bayi
 - 48 Angka usia harapan hidup
 - 49 Cakupan peserta KB aktif
 - 50 Rasio KDRT
 - 51 Pembinaan forum komunikasi anak
 - 52 Indeks Pembangunan Gender
- Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang
- 53 memiliki kompetensi
 - 54 Penurunan persentase kawasan permukiman kumuh
 - 55 Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik
 - 56 Persentase Rumah Tangga yang menggunakan Air Bersih
 - 57 Persentase penanganan sampah
 - 58 Rasio Ruang Terbuka Hijau per satuan luas wilayah ber HPL/HGB
 - 59 Peningkatan jumlah Bangunan yang ber-IMB
 - 60 Pembangunan saluran drainase Gorong-gorong

Uraian lebih rinci mengenai realisasi dan target dari setiap indikator sasaran yang ada dapat dilihat dalam *Lampiran III Formulir Pengukuran Kinerja Tahun 2017*.